

**ABSTRAK**

Notaris merupakan salah satu profesi yang dipandang tinggi dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam lapangan hukum. Jabatan Notaris diperlukan dalam bidang legal, sehingga dengan itu pula secara otomatis perlu adanya peraturan hukum agar jabatan Notaris itu dapat hadir dan dijalankan dengan baik dalam publik. UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pun hadir sebagai peraturan perundang-undangan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam UUJN ditetapkan bahwa Notaris yang melanggar peraturan-peraturan di dalamnya dapat diberhentikan sementara karena melakukan perbuatan tercela atau dengan tidak hormat karena melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa konsep dari perbuatan tercela dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris sehingga terdapat perbedaan definitif antara keduanya, serta apa sanksi yang akan dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan perbuatan tercela dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan masalah konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini membuahkan hasil dalam bentuk kesimpulan, yaitu “perbuatan tercela” dan “perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris” merupakan dua frasa yang merupakan konsep hukum yang sama, namun UUJN memisahkan kedua frasa ini, sehingga memiliki kesan bahwa keduanya merupakan konsep yang berbeda. Conoth Notaris yang melakukan perbuatan tercela dan merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris yaitu selain melakukan pelanggaran norma agama, kesusiaan, dan adat, termasuk juga di dalamnya pelanggaran terhadap Kode Etik (menghina rekan kerja Notaris lainnya atau memeras klien) dan tindakan-tindakan pidana (mencuri, cabul, dan zina). Selain itu, Notaris yang melakukan perbuatan tercela akan diberi sanksi pemberhentian sementara, namun dapat pula dijatuhkan sanksi-sanksi lain yang bersifat perdata maupun administratif, sedangkan Notaris yang melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris akan diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat yang disertai dengan sanksi atas tindak kejahatan atau pidana yang dilakukan Notaris tersebut.

Kata kunci: Perbuatan Tercela, Perbuatan yang Merendahkan Kehormatan dan Jabatan Notaris, Pemberhentian Jabatan Notaris.

## ABSTRACT

Notary Public is one of the highly regarded professions in Indonesian society, especially in the legal field. The Notary Public as a profession is needed in the legal field, therefore legal regulations are a requirement so that the Notary Public as a profession can be present and carried out properly in the public. Act No. 30 of 2004 jo. Act No. 2 of 2014 concerning the Profession of Notary Public (UUJN) is the legal regulation that met those needs. In the UUJN it is stipulated that a Notary who violates the regulations in it may be temporarily discharged for committing a disgraceful act or dishonorably discharged for committing an act that demeans the honor and dignity of the Notary Public profession. The main issues raised in this study are to find the concept of disgraceful deeds and acts that demean the honor and dignity of the Notary Public profession so that there are definitive differences between the two, as well as what sanctions that will be imposed on Notaries Public who commit disgraceful deeds and deeds that demean the honor and dignity of the Notary Public profession .

This study uses a type of normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used in this study are sourced from primary and secondary legal materials.

This research produces results in the form of conclusions, namely that "disgraceful acts" and "acts that demean the honor and dignity of the position of Notary" are two different phrases with the same meaning as a law concept, but UUJN has separated these two phrases, therefore creating the impression that they are of different concepts of law. Examples of both disgraceful acts and acts that demean the honor and dignity of the position of Notary, besides deviating from religion, social, and cultural norms are violations of the Notary Public Code of Conduct (demeaning other/mutual Notary Public or blackmailing clients) acts of crime (thievery, sexual assault, and adultery). In addition, a Notary Public who commits a disgraceful act will be sanctioned with a temporary discharge, but other sanctions that are both civil and administrative in nature may be imposed, while a Notary Public who commits an act that demeans the honor and dignity of the profession of Notary Public profession will be sanctioned with a dishonorable discharge accompanied by sanctions for felonies committed by the Notary Public.

Keywords: Disgraceful Acts, Acts that Demean the Honor and Position of a Notary Public, The Discharge of Public Notary.